

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

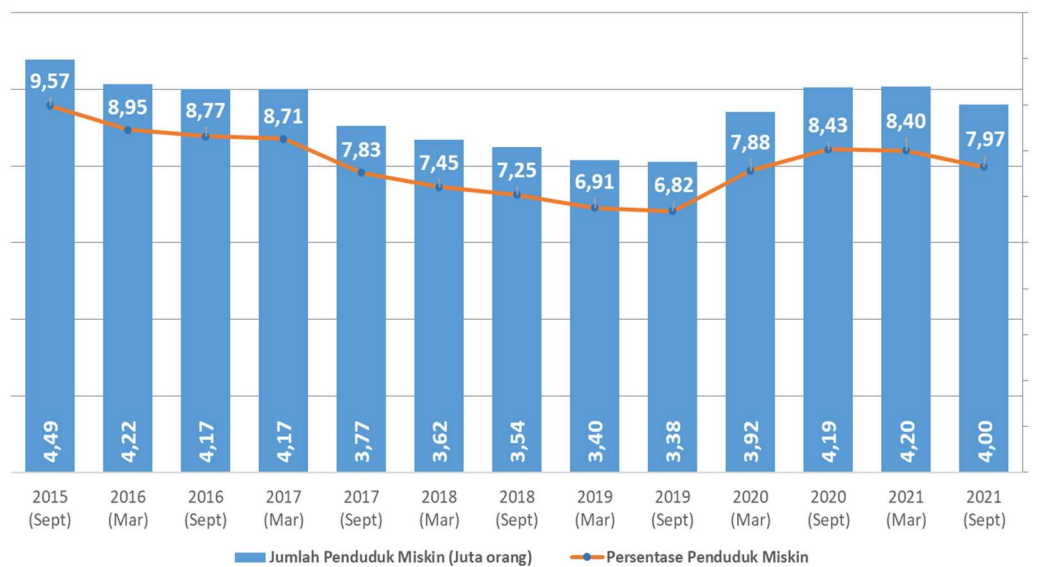
Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang telah dirumuskan dengan khidmat yang tersusun dalam empat alinea, dimana dalam setiap alinea memiliki kandungan makna yang sangat dalam, dan mempunyai nilai-nilai *universal* yang senantiasa kukuh, salah satu makna yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat yaitu terciptanya masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera yang merupakan cerminan dari cita-cita mulia bangsa Indonesia sejak awal kemerdekaan. Pemerintah selalu memberikan sumbangsih terhadap upaya penanggulangan kemiskinan melalui program pembangunan yang bertujuan untuk mengembangkan taraf kesejahteraan masyarakat. Kendati demikian, masalah kemiskinan yang berkepanjangan senantiasa terus melanda negeri ini (Khomsan dkk., 2015)

Sesungguhnya permasalahan kemiskinan sudah menjadi hal yang lumrah bagi negeri ini. Kemiskinan memiliki kandungan makna yang sangat beraneka ragam, seperti ketidakberdayaan dalam menutup kebutuhan konsumsi dasar dan merubah nasib, lemahnya kesempatan berusaha, sehingga kandungan makna yang menanamkan perspektif sosial dan moral (Khomsan dkk., 2015). Dalam arti sempit, kemiskinan dipahami sebagai keadaan kesukaran dalam mencari uang dan tidak memiliki tempat

tinggal yang layak untuk bertahan hidup. Dalam arti luas, kemiskinan merupakan suatu fenomena yang di pahami sebagai fenomena *multiface* atau multidimensional (Khomsan dkk., 2015).

Masalah kemiskinan merupakan perdebatan yang muncul dalam aktivitas bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Masalah kemiskinan merupakan suatu fenomena di dalam masyarakat yang memiliki berbagai macam dimensi. Karena banyaknya dimensi yang terkandung didalamnya, hal ini mendatangkan masalah kemiskinan menjadi objek kajian. Ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan konsumsi dasar seperti pangan, sandang, papan; serta ketiadaan akses terhadap pemenuhan dasar kebutuhan hidup dasar lainnya seperti kesehatan, sanitasi yang bersih, transportasi, pendidikan, maupun tidak adanya jaminan untuk masa depan merupakan ciri umum dalam kemiskinan (Suharto, 2009).

Gambar 1.1. Masyarakat Miskin per September 2015–September 2021 di Jawa Barat



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat

Secara umum, dalam kurun waktu per September 2015-September 2021 tajuk kemiskinan di Jawa Barat menunjukkan kecenderungan menurun baik dari sisi jumlah maupun persentasenya. Namun, sejak kurun waktu Maret 2020 sampai dengan September 2020 terjadi peningkatan kemiskinan di Jawa Barat yang disebabkan pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia termasuk Jawa Barat. Mulai Maret 2021 sampai dengan September 2021, kemiskinan di Jawa Barat mengalami penurunan kembali. Rangkaian tajuk kemiskinan tahun 2015 hingga September 2021 terlihat pada Gambar 1.1.

Di Indonesia masalah kemiskinan selalu menjadi masalah utama yang terus muncul dalam masyarakat dan belum ditemukannya solusi atas permasalahan tersebut. Kemiskinan juga memunculkan masalah sosial lain seperti Gelandangan dan Pengemis (Gepeng). Persoalan gelandangan dan pengemis merupakan bagian dari fenomena dalam masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari realitas kehidupan masyarakat. Gelandangan dan pengemis merupakan salah satu permasalahan sosial yang menyangkut pada faktor perekonomian dan pendidikan di suatu kelompok masyarakat atau lingkungan tertentu (Khairunnisa dkk., 2020) Sebagai gejala sosial, masalah gelandangan dan pengemis hadir di tengah masyarakat. Secara formal pemerintah telah mengambil sikap terhadap permasalahan gelandangan dan pengemis. Untuk menanggulangi permasalahan gepeng, pemerintah mengerahkan lembaga swasta (Milah, 2019).

Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UUD 1945 pasal 34 ayat (1) Negara berkewajiban untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Pemerintah

dan pemerintah daerah juga diwajibkan untuk memberikan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial kepada fakir miskin dan anak terlantar seperti yang dimaksud dalam UUD 1945 sebagai manifestasi pengaktualan kewajiban negara dalam menjamin terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar warga negara khususnya bagi yang dikategorikan miskin dan tidak mampu. Sebagai pengimplementasian dari Pasal 34 (1) UUD 1945 tersebut selanjutnya dikeluarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 yang membahas tentang penanganan fakir miskin.

Hal ini ditegaskan juga dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 yang membahas mengenai Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang No.11 Tahun 2009 yang membahas tentang Kesejahteraan Sosial. Undang-Undang ini memberikan wadah bagi para gelandangan dan pengemis sebagai peluang terbukanya pemenuhan kesejahteraan. Hal ini mengakibatkan, perlu upaya ekstra untuk mengidentifikasi dan meneliti keberadaan para gelandangan dan pengemis untuk memastikan tindakan yang tepat untuk mengatasinya.

Dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 yang membahas mengenai Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial ini dijelaskan bahwa orang yang tidak mampu menyesuaikan dengan kebutuhan hidup layak di dalam masyarakat, serta tidak memiliki mata pencaharian dan tidak memiliki tempat tinggal yang tetap (nomaden) disebut sebagai gelandangan. Gelandangan memiliki kriteria sebagai berikut; tanpa Kartu Tanda Penduduk (KTP); tanpa tempat tinggal yang pasti/tetap; tanpa penghasilan yang tetap; dan tanpa rencana hari depan

anak-anaknya maupun dirinya. Sedangkan orang yang mendapat penghasilan melalui meminta-minta di tempat umum dan menghalalkan segala cara dengan alasan untuk mendapat belas kasihan orang lain disebut sebagai pengemis.

Pada umumnya pengemis menunjukkan belas kasihan dengan keterbatasan penampilan baik keterbatasan fisik ataupun menggunakan anak mereka sebagai alat pelengkap dalam meminta-minta. Seseorang atau sekelompok dapat dikatakan sebagai pengemis jika memiliki kriteria seperti: mata pencahariannya bergantung pada belas kasihan orang lain; berpakaian lusuh, kumuh dan compang-camping; berada ditempat-tempat ramai atau strategis; dan juga antar sesama pengemis saling memengaruhi untuk merangsang belas kasihan orang lain. Permasalahan gelandangan dan pengemis ini terjadi di kota-kota besar, salah satunya ialah di Kota Bekasi.

Kota Bekasi sebagai wilayah penyangga Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta merupakan kawasan yang mudah memperoleh limpahan gelandangan dan pengemis dari Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta hal ini disebabkan karena wilayahnya yang berdekatan. Para gelandangan dan pengemis biasanya migran dari berbagai wilayah di Jawa Barat, Jawa Tengah, juga Lampung. Masyarakat penyandang masalah sosial saat ini mulai menyebar di sejumlah ruas jalan protokol utama di Kota Bekasi dengan harapan mendapat belas kasihan warga. Jalan protokol itu antara lain di Jalan Ahmad Yani, Jalan KH Noer Alie Kalimalang, Jalan M Hasibuan, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Ir H Djuanda, Jalan Cut Meutia, Jalan Kartini, dan Jalan Chairil Anwar. Sebagai wilayah yang paling dekat dengan ibukota Jakarta, Bekasi menjadi daerah strategis incaran mereka karena terlihat menonjol pertumbuhannya. Namun, tidak

dapat dipungkiri bahwa tidak sedikit juga gelandangan dan pengemis asal Kota Bekasi yang masih berkeliaran meskipun telah berulang kali ditangkap.

Tabel 1.1. Data gelandangan dan pengemis tahun 2018-2021 yang di naungi oleh Balai Pangudi Luhur Bekasi

Tahun	Nama Kota/Kab.	Jumlah PPKS	Jumlah Keseluruhan	Tahun	Nama Kota/Kab.	Jumlah PPKS	Jumlah Keseluruhan	Tahun	Nama Kota/Kab.	Jumlah PPKS	Jumlah Keseluruhan
2018	Jawa Tengah	179	770	2020	Sukabumi	7	737	2019	Garut	7	737
	Yogyakarta	21			Jawa Timur	7			Banten	119	
	Bogor	66			Cirebon	4			Jawa Tengah	92	
	Jawa Timur	19			Bogor	7			Sukabumi	8	
	Sumatera	68			Purwakarta	1			Cirebon	23	
	Bandung	51			kuningan	2			Karawang	21	
	Cianjur	26			Cimahi	2			Depok	72	
	Tasikmalaya	10			Sumedang	4			Bogor	94	
	Jakarta	77			Majalengka	2			Bekasi	464	
	Bekasi	68			NTT	1			Purwakarta	2	
	Garut	68			Subang	2			Cianjur	50	
	Banten	33			Bali	1			Jawa Timur	57	
	Majalengka	6			Depok	61			Kalimantan	5	
	Karawang	17			Jakarta	165			Bandung	148	
	Indramayu	5			Karawang	114			Indramayu	54	
	Sukabumi	14			Bekasi	314			NTT	116	
	Sulawesi	7			Jawa Tengah	11			Majalengka	1	
	Madura	1			Majalengka	1			Maluku	1	
	Ciamis	2			Cirebon	3			Cimahi	1	
	Papua	3			Bandung	29			Sumedang	1	
Cirebon	9	Banten	5	Yogyakarta	1						
Kalimantan	6	Sumatera	2	Tasikmalaya	7						
Sumedang	4	Sukabumi	2	Ciamis	1						
Subang	3	Pangandaran	1	Sulawesi	1						
Kuningan	1	Garut	11	Bali	5						
Bekasi	77	Bogor	1								
2019	Banten	29	669	2021	Jawa Timur	1	2044				
	Jakarta	189			Yogyakarta	2					
	Jawa Tengah	93			Maluku	1					
	Yogyakarta	8			Tasikmalaya	1					
	Sumatera	17			Ciamis	2					
	Sulawesi	6			Cimahi	1					
	Garut	15			Banjar	1					
	Cianjur	27			Kuningan	1					
	Karawang	69			Purwakarta	1					
	Bandung	59			Jakarta	576					
	Tasikmalaya	11			Sumatera	108					
	Depok	24			Subang	7					

Sumber: Diolah Oleh Peneliti

Pada tahun 2018-2021 gelandangan dan pengemis yang ada di Kota Bekasi menunjukkan tren kenaikan dari sisi jumlahnya. Namun, gelandangan dan pengemis yang di naungi oleh Balai Pangudi Luhur Bekasi secara keseluruhan pada tahun 2018 sampai dengan 2019 terjadi penurunan. Kemudian mulai tahun 2020 sampai dengan

2021 mengalami kenaikan kembali hal ini disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia. Perkembangan jumlah gelandangan dan pengemis tahun 2018 sampai dengan 2021 terlihat pada Tabel 1.1.

Kehadiran gelandangan dan pengemis di tengah-tengah masyarakat tentunya tidak terlepas oleh beberapa faktor yang mendukung. Faktor-faktor kemunculan gelandangan dan pengemis ini diharapkan dapat menjadi suatu bekal atas penanggulangan masalah gelandangan dan pengemis, sehingga dapat dihadirkan model penanganan yang tepat untuk menanggulangi bertambahnya gelandangan dan pengemis dalam jangka panjang. Salah satu faktor utama munculnya gelandangan dan pengemis adalah kemiskinan sehingga gelandangan dan pengemis perlu mendapatkan perlindungan sosial.

Masalah gelandangan dan pengemis merupakan masalah kesejahteraan sosial yang cukup besar. Kemiskinan yang terus melanda gelandangan dan pengemis ini merupakan suatu kultur yang kurang baik untuk diteruskan pada anak-anak mereka nantinya. Namun, demi mendapat keuntungan gelandangan dan pengemis menghalalkan segala cara. meskipun dengan cara yang mengundang keresahan bagi masyarakat sekitar, terlebih seperti yang sudah dijelaskan bahwa gelandangan dan pengemis dapat menimbulkan masalah lain seperti eksploitasi anak, tindakan kriminal seperti perampokan, penjambretan maupun pelecehan seksual, dan lain sebagainya. Hal-hal yang dapat meresahkan masyarakat dengan aktivitas yang dilakukan oleh gelandangan dan pengemis menjadikan penanganan gelandangan dan pengemis merupakan program yang semestinya segera dilaksanakan dengan cepat (Fadri, 2019).

Kendati demikian pemerintah tidak tinggal diam untuk menangani masalah gelandangan dan pengemis tersebut. Pemerintah terus berupaya untuk menuntaskan permasalahan gelandangan dan pengemis salah satunya adalah dengan menyediakan lembaga-lembaga, balai, atau panti sosial sebagai pusat kegiatan pelayanan sosial melalui Balai Rehabilitasi Sosial untuk gelandangan dan pengemis khususnya yang tersebar di Kota Bekasi. Balai Pangudi Luhur Kota Bekasi milik Kementerian Sosial Republik Indonesia menjadi wadah bagi penerima manfaat dalam mengembangkan usaha mulai dari produksi hingga pemasaran produk melalui Sentra Kreasi Atensi (SKA) yang merupakan bagian dari program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) hasil kolaborasi antara Kementerian Sosial Republik Indonesia dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. Balai rehabilitasi sosial ini memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pelayanan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial, khususnya bagi gelandangan dan pengemis (Widiati, 2021).

Program ATENSI merupakan salah satu program strategis dalam upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak layanan rehabilitasi sosial yang menggunakan pendekatan berbasis keluarga, komunitas, atau residensial melalui dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak, dukungan keluarga, bantuan sosial, dukungan aksesibilitas, dan lain sebagainya. Cakupan dari program tersebut meliputi perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, dan rehabilitasi sosial. Dalam proses pengimplementasian program ATENSI masih terdapat beberapa kendala yaitu pemerintah daerah perlu menyediakan alokasi anggaran, sarana dan prasarana

yang memadai, serta sumber daya manusia yang cukup untuk menjadi mitra Pemerintah Pusat dalam melaksanakan program tersebut. Pemerintah daerah dituntut untuk berperan aktif dalam menyediakan layanan rehabilitasi sosial seperti memfasilitasi pembentukan rumah, perlindungan sosial, hingga berkolaborasi dengan balai rehabilitasi sosial yang ada di daerah (Widiati, 2021).

Program ATENSI yang disediakan oleh Balai Karya Pangudi Luhur Kota Bekasi milik Kementerian Sosial Republik Indonesia ini juga belum terlaksana dengan baik. Masih banyak kendala dalam pelaksanaan program tersebut seperti, fasilitas yang kurang memadai, hingga kurangnya partisipasi dari penerima manfaat yakni gelandangan dan pengemis terhadap program rehabilitasi sosial, selain itu kurangnya pemanfaatan program yang telah diberikan sehingga ketika dilakukan terminasi banyak dari warga binaan balai yang tidak mampu mengimplementasikan keterampilan yang diajarkan di balai dan kembali menjadi gelandangan dan pengemis.

Adanya masalah-masalah diatas peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait evaluasi dari pelaksanaan program ATENSI di balai rehabilitasi gelandangan dan pengemis, mengingat bahwa gelandangan dan pengemis merupakan masalah yang cukup mengakar di Indonesia. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian tentang **“Evaluasi Program Asisten Rehabilitasi Sosial (ATENSI) Dinas Sosial Kota Bekasi dalam Memberdayakan Gelandangan dan Pengemis Di Kota Bekasi”**.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang dapat penulis rumuskan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana evaluasi program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) dalam penanganan gelandangan dan pengemis di Balai Karya Pangudi Luhur Bekasi?
2. Bagaimana koordinasi antara Kementerian Sosial Republik Indonesia dengan Dinas Sosial Kota Bekasi dalam penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Bekasi?
3. Bagaimana persepsi gelandangan dan pengemis terkait program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI)?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan penelitian diatas maka peneliti memiliki tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Menganalisis evaluasi program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) dalam penanganan gelandangan dan pengemis di Balai Karya Pangudi Luhur Bekasi
2. Menganalisis koordinasi antara Kementerian Sosial Republik Indonesia dengan Dinas Sosial Kota Bekasi dalam penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Bekasi
3. Menganalisis persepsi gelandangan dan pengemis terkait program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI)

1.4. Signifikansi Penelitian

Berdasarkan penelitian sebelumnya, maka penelitian ini membagi signifikansi menjadi dua, yaitu signifikansi akademik dan signifikansi praktis.

1.4.1. Signifikansi Akademik

Berbagai penelitian tentang strategi dan program untuk menangani permasalahan gelandangan dan pengemis telah banyak dilakukan sebelumnya, namun peneliti belum menemukan penelitian terkait bagaimana evaluasi program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) dalam memberdayakan gelandangan dan pengemis di Kota Bekasi.

Rujukan pertama, diperoleh dari artikel jurnal yaitu Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial (REHSOS) Vol. 2 No. 2, Desember, 2020. Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Bagi Gelandangan dan Pengemis di Balai Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis di Pulau Jawa. Ditulis oleh Eltiga Angga Putra Sihombing, Dwi Yuliani & Windriyanti. Jurnal ini dipublikasikan oleh Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial yang diterbitkan oleh Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh gelandangan dan pengemis dapat menimbulkan masalah lain seperti pelecehan seksual, eksploitasi anak, dan sebagainya. Pemerintah tidak tinggal diam untuk menangani masalah tersebut. Pemerintah menyediakan lembaga-lembaga, balai, atau panti sosial sebagai pusat kegiatan pelayanan sosial namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala.

Permasalahan yang dibahas pada penelitian ini adalah bagaimana proses rehabilitasi sosial yang dilaksanakan di Balai Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan

Pengemis di Pulau Jawa? bagaimana jenis program rehabilitasi sosial yang dilaksanakan di Balai Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis di Pulau Jawa? dan bagaimana faktor pendukung dalam program rehabilitasi sosial di Balai Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis di Pulau Jawa? serta bagaimana faktor penghambat dalam program rehabilitasi sosial di Balai Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis di Pulau Jawa? teori yang dirujuk adalah Dorang Luhpuri dan Rini Hartini R.A (2019) tentang bagaimana proses rehabilitasi sosial.

Jurnal ini menggunakan metode analisis data sekunder yaitu memanfaatkan data kuantitatif ataupun kualitatif yang sudah ada untuk menemukan permasalahan baru atau menguji hasil penelitian terdahulu, sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder yang didapatkan di lokasi penelitian melalui studi dokumentasi terhadap buku-buku maupun literatur. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan dan jurnal penelitian yang terkait dengan program rehabilitasi sosial di balai.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses rehabilitasi sosial di Balai Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis di Pulau Jawa sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hasil penelitian juga menjelaskan tentang jenis program rehabilitasi sosial yang disediakan di Balai Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis di Pulau Jawa. Program rehabilitasi sosial juga sudah terlaksana dan sesuai dengan kebutuhan WBS. Dalam pelaksanaan program rehabilitasi sosial juga terdapat faktor pendukung dan penghambat yang dapat mempengaruhi berjalannya program. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari warga binaan, pihak balai, ataupun pihak

diluar balai. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program rehabilitasi sosial di Balai Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis di Pulau Jawa sudah berjalan sebagaimana mestinya walaupun masih terdapat hambatan di dalamnya.

Dalam penelitian ini Peneliti berharap agar hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu referensi untuk penelitian selanjutnya dengan metode dan pendekatan penelitian yang berbeda sehingga akan memperoleh hasil yang lebih mendalam dari aspek yang dibahas dalam penelitian ini. Penelitian Eltiga Angga Putra Sihombing, Dwi Yuliani & Windriyanti (2020) ini relevan karena topik penelitiannya sama-sama membahas tentang program rehabilitasi sosial bagi gelandangan dan pengemis dan dapat dijadikan sebagai acuan dalam penulisan latar belakang maupun teori yang dirujuk.

Rujukan kedua, diperoleh dari artikel jurnal yaitu Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam Vol. 10, No. 1, Juni 2019, E-ISSN: 2540-9182, P-ISSN: 2086-3357. Dengan judul Upaya Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) Sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Di Yogyakarta. Ditulis oleh Zainal Fadri. Jurnal ini dipublikasikan oleh Komunitas: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam yang diterbitkan oleh Departemen Pengembangan Umat Islam. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Mataram pada tahun 2009 dan diterbitkan secara elektronik dengan sistem *e-journal* pada tahun 2017.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sikap malas dan pasrah untuk menerima nasib banyak terjadi pada kaum gelandangan dan pengemis. Dengan alasan

keterbatasan ekonomi keluarga, pengemis dan gelandangan rela melakukan upaya apapun demi mendapatkan *benefit*, meskipun dengan cara yang tidak tepat dan menghadirkan keresahan bagi warga sekitar. Hal-hal yang memungkinkan dapat meresahkan masyarakat dengan aktivitas yang dilakukan oleh gepeng menjadikan penanganan gepeng merupakan program yang semestinya segera dilaksanakan dengan cepat.

Permasalahan yang dibahas pada penelitian ini adalah hal yang berkaitan dengan gepeng (gelandangan dan pengemis), diantaranya faktor kemunculan gepeng, dampak gepeng bagi masyarakat, strategi penghapusan gepeng, serta faktor pendukung dan penghambat dalam penanggulangan gepeng. Merujuk pada teori N.H.T Siahaan (2004) tentang definisi kemiskinan kultural, Departemen Sosial R.I (1992) tentang definisi pengemis, PP No. 31 Tahun 1980 tentang definisi pengemis, Muthalib dan Sudjarwo dalam Ali, dkk., (1990) tentang 3 gambaran umum gelandangan, Marpuji Ali, dkk., (1990) tentang istilah gelandangan & ciri-ciri yang menjadi karakter bagi gelandangan dan pengemis. Jurnal ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data diambil dari menggunakan referensi dan penelitian sebelumnya dengan melakukan penelitian informal wawancara sebagai bentuk pendekatan gepeng pada kegiatan mereka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa gepeng memiliki karakteristik yang berbeda dengan kasus jalanan biasa, maka penanganan gepeng harus dilakukan secara pendekatan yang berbeda. Penanganan gepeng oleh pemerintah, swasta sektor dan masyarakat dalam suatu integrasi tentunya akan berdampak positif dampak mitigasi

gepeng, dan telah dilakukan di Yogyakarta meskipun belum mengatasi masalah secara tuntas. Penelitian Zainal Fadri (2019) ini relevan karena topik penelitiannya sama-sama membahas tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis (gepeng) diantaranya faktor kemunculan gepeng, dampak gepeng bagi masyarakat, strategi penghapusan gepeng, serta faktor pendukung dan penghambat dalam penanggulangan gepeng yang mana dapat dijadikan rujukan dalam penulisan.

Rujukan ketiga, diperoleh dari artikel jurnal yaitu Jurnal Penelitian Sosial dan Ilmu Komunikasi Volume 4, Nomor 1, April 2020, hlm. 20 – 29, e-ISSN: 2656-8306. Dengan judul Analisis Strategi Komunikasi Dinas Sosial Kota Bogor Dalam Menanggulangi Anak Jalanan Di Kota Bogor. Ditulis oleh Arie Ardiwijaya, Wiranta Yudha Ginting & Layung Paramesti Martha. Jurnal ini dipublikasikan oleh Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya, Universitas Pakuan, Kota Bogor.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Pemkot Bogor secara terus-menerus melakukan penertiban pada pengidap masalah kesejahteraan sosial, penertiban ini dilaksanakan untuk anak jalanan di ruas titik Kota Bogor, dengan mendapat laporan dari masyarakat yang memperlmasalahkan terkait adanya anak jalanan serta kehadiran mereka yang sangat menakutkan. Hasil aktivitas penertiban yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Bogor hanya 1 dari 100 anak jalanan yang terjaring razia yang bersedia mengikuti pembinaan dan keterampilan dari Dinas Sosial Kota Bogor.

Permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana strategi komunikasi Dinas Sosial Bogor dalam menjalin komunikasi dengan anak jalanan di Bogor? penelitian ini

merujuk pada konsep SWOT Rangkuti (2014:19) yakni memaksimalkan kekuatan (*strength*) dan peluang (*opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weakness*) dan ancaman (*threats*), Effendy (2009:33) membahas mengenai menanggulangi anak jalanan dengan strategi komunikasi. Lasswell (1948) membahas tentang secara ilmiah proses komunikasi menitikberatkan pada jawaban dari pertanyaan yang telah di kemukakan sekaligus berbagai turunan dari setiap elemen komunikasi. Kelima rumus komunikasi tersebut yakni komunikator, sasaran, pesan dan informasi, media, efek.

Metode yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode deskriptif kualitatif untuk mengungkap masalah dan situasi di Dinas Sosial Bogor untuk menerapkan strategi komunikasi dalam menangani anak jalanan. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Teknik validitas data menggunakan triangulasi sumber untuk mengkomparasi data yang dikumpulkan dari observasi dan data yang dikumpulkan dari wawancara mendalam. Triangulasi sumber dalam penelitian ini adalah Rumah Merah Putih, salah satu yayasan sosial di Bogor.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa teori yang dipakai untuk menganalisis *Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat* (SWOT) dapat merepresentasikan penanganan anak jalanan yang saat ini dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Bogor. Penelitian Arie Ardiwijaya, Wiranta Yudha Ginting & Layung Paramesti Martha (2020) ini relevan karena topik penelitiannya sama-sama membahas tentang strategi

dalam menanggulangi anak jalanan yang mana anak jalanan juga merupakan bagian dari gelandangan, selain itu dapat dijadikan sebagai acuan dalam menulis.

Rujukan keempat, diperoleh dari artikel jurnal yaitu Jurnal Ilmu Hukum Reusam ISSN 2338-4735, E-ISSN 27225100 Volume VIII, Nomor 1, Mei 2020. Dengan judul Kebijakan Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Studi Penelitian Di Kabupaten Aceh Utara). Ditulis oleh Yusrizal & Romi Asmara. Jurnal ini diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sepengetahuan peneliti belum adanya penanganan gelandangan dan pengemis di Kabupaten Aceh Utara secara terpadu, berkesinambungan dan *output* yang dihasilkan, seringkali gelandangan dan pengemis dimarjinalkan karena status mereka dalam masyarakat, hal inilah yang menggugah tim peneliti untuk mengkaji gelandangan dan pengemis secara komprehensif.

Permasalahan yang dibahas pada penelitian ini adalah Bagaimanakah kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam hal penanggulangan gelandangan dan pengemis? Hambatan apa saja yang ditemui dalam penerapan kebijakan terhadap penanggulangan gelandangan dan pengemis di Kabupaten Aceh Utara? Penelitian ini merujuk pada teori R. Soesilo (1988: 327) yang membahas tentang definisi pengemis, Sastraatmadja (1987: 23) membahas tentang definisi gelandangan, Arief (2010: 42) membahas tentang Pendekatan humanistis dalam penanggulangan gelandangan dan pengemis, Beccaria (2011: 7-8) membahas tentang Kerasnya hukuman akan berlawanan dengan keadilan dan permufakatan sosial,

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyaratan adalah bagi negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Jurnal ini menggunakan metode yuridis empiris bertipe sosiologi. Penelitian ini menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melakukan pengamatan langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa kebijakan penanggulangan gelandangan dan pengemis yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara serta Satuan Polisi Pamong Praja, diantaranya adalah: melakukan penertiban/razia terhadap gelandangan dan pengemis, upaya pemberdayaan Pengemis, seperti diberikan pelatihan keahlian sesuai minat dan bakat, juga adanya pemberdayaan ekonomi yang bersifat produktif yang anggarannya berasal dari anggaran pemerintah kabupaten maupun provinsi, diberikannya bantuan langsung tunai untuk menopang perekonomian yang termasuk penyandang masalah kesejahteraan sosial yang cacat secara fisik.

Penelitian Yusrizal & Romi Asmara (2020) ini relevan karena topik penelitiannya sama-sama membahas tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis namun pada penelitian Yusrizal & Romi Asmara ini lebih membahas mengenai kebijakan yang diterapkannya dalam menangani masalah gelandangan dan pengemis tetapi tetap bisa dijadikan acuan dalam penulisan.

Rujukan kelima, diperoleh dari artikel jurnal yaitu Jurnal MODERAT, Volume 6, Nomor 1, Februari 2020, ISSN: 2442-3777 (cetak), ISSN: 2622-691X

(online). Dengan judul *Smart Urban Service* Upaya Rehabilitasi dan Preventif Pengemis dan Gelandangan Di Kota Yogyakarta. Ditulis oleh Tiara Khairunnisa, Eko Priyo Purnomo & Lubna Salsabila. Jurnal ini dipublikasikan oleh Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketimpangan yang terjadi pada masyarakat yang mengemis dan menggelandang bukan hanya perihal keterbatasan perekonomian dan kesejahteraan pribadi, akan tetapi adanya unsur mengeksploitasi anak dengan mempekerjakan anak di bawah umur tersebut dengan tidak layak, yakni dengan cara meminta-minta juga menjadi tambahan dalam permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah Kota Yogyakarta. Kondisi tersebut dapat menyebabkan anak-anak jalan yang seharusnya memiliki kehidupan seperti anak biasa pada umumnya menjadikan mereka tidak memiliki masa depan yang baik serta menimbulkan permasalahan di lingkungan keluarga, masyarakat dan pemerintah.

Permasalahan yang dibahas pada penelitian ini adalah bagaimana Pemkot Yogyakarta untuk menanggulangi gepong akibat tingginya tingkat urbanisasi di daerah perkotaan. Penelitian ini merujuk pada teori Annisah (2017) membahas mengenai pemanfaatan *Information and Communication Technology* (ICT) dalam *Smart Governance* perlu dititik beratkan pada ketersediaan infrastruktur dan pemberdayaan sumber daya manusianya, PPSPR UGM (2016) membahas tentang 6 poin untuk mewujudkan *smart city* di Yogyakarta diantaranya yakni membuat sosialisasi agar semua terlibat mewujudkan *smart city*, penyesuaian kebijakan dengan strategi *smart city* Yogyakarta, menata unsur *smart city* meliputi kelembagaan, jejaring dan sumber

daya, pembangunan dan pengembangan *smart city* Yogyakarta, Chandra Eko Wahyudi Utomo & Mochamad Hariadi, (2016) membahas mengenai tantangan dari adanya konsep 6 poin untuk mewujudkan *smart city* yakni ketersediaan data dan informasi, keamanan dan privasi, investasi yang besar, infrastruktur *Information and Technology* (IT), dan adaptasi sosial dan pengembangan aplikasi.

Metode yang digunakan dalam jurnal ini yaitu metode kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data berupa studi literatur dengan melihat penelitian terdahulu, wawancara, serta observasi langsung ke lapangan. Dari data yang didapatkan diolah dengan mengaitkan dengan teori-teori yang sudah dirancang sebelumnya. Dari rangkaian tersebut kemudian dilakukan penarikan kesimpulan berdasarkan proses verifikasi dari subyek penelitian dengan kerangka teori yang ditentukan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam upaya rehabilitasi dan juga preventif yang dilakukan pemerintah Kota Yogyakarta memiliki beberapa kekurangan seperti minimnya tenaga ahli psikologi, kurangnya inovasi dalam pelaksanaan program sehingga menurunkan tingkat antusiasme peserta, serta kurangnya dukungan dari masyarakat terhadap regulasi yang mengatur tentang larangan memberi uang terhadap pengemis sehingga menghambat jalannya pemberdayaan yang di jalankan oleh pemerintah. Penelitian Tiara Khairunnisa, Eko Priyo Purnomo & Lubna Salsabila (2020) ini relevan karena topik penelitiannya sama-sama membahas tentang upaya rehabilitasi pengemis dan gelandangan meskipun lebih banyak membahas mengenai *smart urban service* tetapi tetap bisa dijadikan acuan dalam penulisan latar belakang maupun teori yang dirujuk.

Rujukan keenam, diperoleh dari artikel jurnal yaitu Jurnal Demokrasi & Otonomi Daerah, Volume 16, Nomor 3, September 2018, hlm. 165-256. Dengan judul Pemberdayaan Gelandangan dan Pengemis. Ditulis oleh Ricky Perianto. Jurnal ini dipublikasikan sejak tahun 2003 oleh prodi Magister Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau bekerjasama dengan Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIP) Cabang Pekanbaru. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurang efektifnya pembinaan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru. Hal ini terlihat bahwa kegiatan pembinaan dan pelatihan terhadap gepeng belum menekan kepada gepeng untuk meninggalkan pekerjaan tersebut. Berdasarkan hasil data yang terdapat di Dinas Sosial bahwa pada tahun 2014 jumlah yang mengikuti pembinaan sebanyak 15 orang, dan 10 orang yang sudah mendapat pembinaan tersebut pada tahun 2015 terjaring razia kembali. Mereka tidak mendapatkan pembinaan lagi dan dipulangkan ke daerahnya.

Permasalahan yang dibahas pada penelitian ini adalah bagaimana pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinsos dan Pemakaman Kota Pekanbaru dalam menanggulangi gepeng. Penelitian ini merujuk pada teori Anwas, Oos M. 2013. Pemberdayaan Masyarakat di Era Global. Gunawan Sumodiningrat, 1999. Pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan Pengaman Sosial. James A.F. Stoner & Charles Wankel. 2003. Perencanaan dan Pengambilan Keputusan dalam Manajemen. Moleong, J. Lexy. 2004. Metodologi Penelitian Kualitatif. Santoso, Purwo. 2004. Menembus Ortodoksi Kajian Kebijakan Publik. Soetomo. 2008. Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat. Suharto, Edi. 2009. Membangun Masyarakat

Memberdayakan Rakyat. Sobry Sutikno. 2012. Manajemen Pendidikan: Langkah Praktis Mewujudkan Lembaga Pendidikan Yang Unggul (Tinjauan Umum dan Islami).
Wrihatnolo, Randy dan Riant Nugroho Dwidjowijoto. 2007. Manajemen Pemberdayaan.

Penelitian deskriptif ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagai alat analisis. Penelitian ini dilakukan oleh Dinsos dan Pemakaman Kota Pekanbaru dan mengambil data sampel di Dinas Sosial. Penelitian ini menggunakan dokumentasi dan wawancara dengan informan sebagai objek informasi yang bertujuan untuk mencapai tujuan untuk memperoleh informasi dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui dokumentasi dan wawancara langsung dengan informan dalam penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan modal Dinsos dan Pemakaman Kota Pekanbaru selama ini cukup baik. Dengan cara itu gepeng diharapkan untuk mencari nafkah dengan cara yang tidak melanggar norma dan hukum sosial. Dinas Sosial masih memiliki banyak kekurangan diantaranya masa rehabilitasi hanya 3-7 hari tidak cukup efektif untuk memberikan pelatihan. Pemerintah tidak mengawasi jumlah maksimum tunawisma dan pengemis yang mendapatkan bantuan modal usaha, sehingga bisnis yang mereka jalankan hanya sementara dan kemudian mereka lebih memilih untuk kembali mengemis dan memohon. Penelitian Ricky Perianto (2018) ini relevan karena topik penelitiannya membahas mengenai pemberdayaan gepeng yang mana dapat dijadikan rujukan dalam penulisan.

Rujukan ketujuh, diperoleh dari artikel jurnal yaitu *Learning Community: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 3 (1), Maret 2019 – 29. Dengan judul Efektifitas Program Pendidikan *Nonformal* Terhadap Pemberdayaan Gelandangan dan Pengemis Di Lingkungan Pondok Sosial Kabupaten Jember. Ditulis oleh Sofyan Hadi, Niswatul Imsiyah & Sylva Alkornia. Jurnal ini diterbitkan oleh fakultas keguruan dan ilmu pendidikan universitas jember. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh semakin banyaknya jumlah gepeng merupakan salah satu permasalahan kemiskinan, yang diakibatkan oleh kualitas hidup dibawah garis kemiskinan. Senada dengan hal tersebut, Lingkungan Pondok Sosial (Liposos) merupakan lembaga di Kabupaten Jember yang memiliki program pemberdayaan khususnya program pelatihan yang merupakan program dari pendidikan *non formal*.

Penelitian ini membahas tentang permasalahan Bagaimana efektifitas program pendidikan *non formal* terhadap pemberdayaan gelandangan dan pengemis di Lingkungan Pondok Sosial Kabupaten Jember. Penelitian ini merujuk pada UU Sisdiknas (2003) tentang penyadaran dalam proses pemberdayaan gelandangan dan pengemis. Sedangkan efektifitas program pendidikan *non formal* terhadap pengkapasitasan gepeng, pada tahap awal gelandangan dan pengemis diberikan pelatihan yang telah disesuaikan dengan kebutuhan dan diharapkan, mereka mampu menguasai materi yang diberikan sesuai dengan perencanaan program yang telah disesuaikan dengan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang digunakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) liposos (Wrihatnol, dkk, 2007).

Metode yang digunakan dalam jurnal ini dengan metode deskriptif kualitatif. Teknik penentuan informan yaitu *snowball sampling*. Jurnal ini menggunakan metode pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan *key* informan yaitu pegawai lingkungan pondok sosial dan informan pendukung yaitu staf bidang pemberdayaan Dinas Sosial Kabupaten Jember serta gepeng. Teknik keabsahan data menggunakan perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, dan triangulasi (teknik dan sumber), analisis data yang digunakan yaitu reduksi, penyajian data, dan verifikasi.

Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa adanya efektifitas program pendidikan non formal terhadap pemberdayaan gepeng di UPT Liposos. Hal ini dilihat dari adanya SOP dalam pelaksanaan proses pemberdayaan, sehingga proses pemberdayaan dapat berjalan terarah mulai dari tahap kesadaran dan tahap pengkapasitasan. Penelitian Sofyan Hadi, Niswatul Imsiyah & Sylva Alkornia (2019) ini relevan karena topik penelitiannya sama-sama membahas tentang efektifitas program untuk memberdayakan gelandangan dan pengemis yang mana dapat dijadikan sebagai acuan dalam penulisan.

Rujukan kedelapan, diperoleh dari artikel jurnal yaitu Prosiding KS: Riset & PKM, Vol. 3, No. 1, hlm. 1 – 154, ISSN: 2442-4480. Dengan judul Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis Oleh Panti Sosial Bina Karya “Pangudi Luhur” Bekasi. Ditulis oleh Betha Dwidinanti Zefianningsih, Budhi Wibhawa, & Hadiyanto A. Rachim. Jurnal ini diterbitkan oleh Prosiding KS: Riset & PKM. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh gelandangan dan pengemis diakibatkan oleh faktor ekonomi dan

kebutuhan hidup yang semakin mendesak. Oleh karena itu, pemecahan masalahnya harus mencakup dua aspek yaitu: (i) kondisi di daerah asal; (ii) kondisi daerah tujuan. penelitian ini membahas mengenai permasalahan penanggulangan gepeng.

Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa penanggulangan masalah gepeng ini tidak terlepas dari penanggulangan kemiskinan itu sendiri, terutama jika dilihat dari sudut pandang daerah asal gepeng. Memang, kemiskinan bukanlah satu-satunya penyebab terjadinya kegiatan gepeng tetapi bisa juga menjadi akar penyebab. Oleh karena itu, beberapa alternatif pemecahan masalah yang berkenaan dengan penanganan gepeng dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu: (i) kondisi di daerah asal; (ii) kondisi di luar daerah asal. Prinsipnya ialah upaya pencegahan dilakukan di daerah asal sehingga mereka tidak terdorong untuk meninggalkan desanya dan mencari penghasilan di kota dengan cara mengemis. Sedangkan di sisi lain, prinsipnya ialah penanggulangan di tempat tujuan. Penelitian Betha Dwidinanti Zefianningsih, Budhi Wibhawa, & Hadiyanto A. Rachim ini relevan karena topik penelitiannya sama-sama membahas tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis terlebih lokus penelitiannya pun dilakukan di Kota Bekasi yang memang dijadikan lokus penelitian penulis yang juga dapat dijadikan acuan dalam penulisan.

Rujukan kesembilan, diperoleh dari artikel jurnal yaitu JOM FISIP Vol. 4 No. 2, Oktober 2017. Dengan judul Evaluasi Program Pemberdayaan Eks Penyandang Tuna Sosial (Gelandangan Dan Pengemis) Pada Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru Tahun 2015. Ditulis oleh Adhe Akbar Apiantara. Jurnal ini diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Riau. Penelitian ini

dilatarbelakangi oleh pelaksanaan otonomi daerah perlu menekankan pada prinsip demokrasi, partisipasi masyarakat, pemerataan dan keadilan di Kota Pekanbaru. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka pemkot Pekanbaru dituntut untuk segera meningkatkan upaya-upaya pengendalian dan pengawasan sosial kesejahteraan. Penelitian ini merujuk pada Teori Evaluasi Program (Dunn) kriteria-kriteria evaluasi kebijakan (Rasyid), Teori Pembinaan Santoso (2004; 52). Jurnal ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif, yakni mencoba menganalisis dinamika dan memberikan gambaran tentang data yang diperoleh dari pengamatan dan tujuan memperkuat dan memperkuat teori untuk memperoleh informasi tentang keadaan saat ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik wawancara, dokumentasi dan observasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencegahan masih belum maksimal karena masih banyak masyarakat yang belum mendapat sosialisasi peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang ketertiban sosial. Usaha represif yang dilakukan sejauh ini sudah baik dengan melibatkan berbagai macam institusi lembaga baik SATPOL PP dan Kepolisian Daerah Kota Pekanbaru. Dalam rehabilitasi sosial masih terdapat banyak kekurangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, karena mereka hanya memiliki waktu 3-7 hari saja dalam melakukan rehabilitasi yang anggap waktu sedemikian rupa tidak akan cukup efektif untuk memberikan pembinaan dan pelatihan, selain itu pemerintah juga tidak mengawasi dengan maksimal eks tuna sosial yang mendapatkan bantuan modal usaha, sehingga usaha yang mereka jalankan

hanya bersifat sementara dan kemudian mereka lebih memilih kembali menggelandang dan mengemis.

Anggaran yang disediakan pemerintah daerah dianggap tidak optimal dalam upaya menjalankan program yang sudah direncanakan sehingga dalam upaya preventif, represif dan rehabilitasi sosial masih terdapat beberapa kendala yang disebabkan minimnya anggaran. Sarana dan prasarana menjadi salah satu penghambat dikarenakan merupakan efek dari minimnya anggaran yang disediakan pemerintah daerah, hal ini berimbas pada tidak adanya *shelters* (tempat penampungan sementara) yang memadai, sehingga Dinas Sosial hanya mampu menyewa rumah kontrakan sebagai sarana pendukung. Selain itu terdapat beberapa *shelters* yang berhenti beroperasi karena minimnya anggaran. Penelitian Adhe Akbar Apiantara (2017) ini relevan karena topik penelitiannya sama-sama membahas tentang evaluasi program pemberdayaan gelandangan dan pengemis yang mana dapat diajukan sebagai bahan acuan dalam penulisan skripsi maupun sebagai acuan dalam penulisan teori.

Rujukan kesepuluh, diperoleh dari artikel jurnal yaitu Quantum: Jurnal Ilmiah Kesejahteraan Sosial, vol XVI, nomor 1, Januari-Juni 2020. Dengan judul Membangun SLRT Dalam Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan. Ditulis oleh Agus Widiatmo. Jurnal ini diterbitkan oleh Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Regional I Padang, yang berada dibawah naungan Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial Kementerian Sosial RI.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi dimaksud menyadarkan kepada kita bahwa akan mengganggu kesatuan dan persatuan bangsa apabila tidak diantisipasi

dengan tepat dan juga sebagai potensi untuk mensejahterakan. Antar wilayah barat, tengah, dan timur maupun wilayah kota maupun desa yang ada di Indonesia banyak ditemukan masalah kesenjangan. Dengan demikian mengakibatkan pengimplementasian tersebut memiliki tantangan besar. Penelitian ini merujuk pada Keputusan Menteri Sosial Nomor 50/HUK/2013 tentang Pelayanan Terpadu Gerakan Masyarakat Peduli Kabupaten/Kota Sejahtera. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya komitmen yang baik yang diwujudkan dalam dukungan kebijakan, sumber daya, keberadaan perencanaan kegiatan perencanaan kerja, rasionalitas budaya organisasi, ketersediaan data dan informasi, maupun sarpras, pembiayaan serta keberadaan mekanisme pelaporan menunjang keberhasilan SLRT. Penelitian Agus Widiatmo (2020) ini relevan karena topik penelitiannya sama-sama membahas tentang program pemberdayaan sosial penanggulangan kemiskinan yang mana dapat dijadikan sebagai acuan dalam penulisan teori.

Penelitian terdahulu membahas tentang program rehabilitasi sosial bagi gelandangan dan pengemis (Eltiga Angga Putra Sihombing, Dwi Yuliani & Windriyanti, 2020), penanggulangan gelandangan dan pengemis (Zainal Fadri, 2019), strategi dalam menanggulangi anak jalanan (Arie Ardiwijaya, Wiranta Yudha Ginting & Layung Paramesti Martha, 2020), kebijakan dalam penanggulangan gelandangan dan pengemis (Yusrizal & Romi Asmara, 2020), smart urban service upaya rehabilitasi

dan preventif pengemis dan gelandangan (Tiara Khairunnisa, Eko Priyo Purnomo & Lubna salsabila, 2020), pemberdayaan gelandangan dan pengemis (Ricky Perianto, 2018), efektifitas program untuk memberdayakan gelandangan dan pengemis (Sofyan Hadi, Niswatul Imsiyah & Sylva Alkornia, 2019), penanggulangan gelandangan dan pengemis (Betha Dwidinanti Zefianningsih, Budhi Wibhawa, & Hadiyanto A. Rachim, 2015), evaluasi program pemberdayaan gelandangan dan pengemis (Adhe Akbar Apiantara, 2017), dan program pemberdayaan sosial penanggulangan kemiskinan (Agus Widiatmo, 2020).

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena lebih fokus pada evaluasi program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) dalam memberdayakan gelandangan dan pengemis di Kota Bekasi dan menganalisis koordinasi antara pusat dan daerah dalam penanganan gelandangan dan pengemis, serta menganalisis persepsi gelandangan dan pengemis terkait program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) yang merujuk pada Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial, penelitian ini menerapkan metode penelitian kualitatif, teknik perolehan data menggunakan observasi dan wawancara mendalam.

Secara akademik, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penelitian pada pengembangan keilmuan Administrasi Negara, khususnya studi evaluasi program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) dalam memberdayakan gelandangan dan pengemis di Kota Bekasi dan dijadikan sebagai bahan rujukan untuk perbaikan program kerja di masa yang akan datang khususnya bagi program ATENSI,

serta dapat berkontribusi pada kajian strategi pengentasan kemiskinan yang menangani permasalahan gelandangan dan pengemis di Kota Bekasi.

1.4.2. Signifikansi Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan, bahan rujukan maupun sebagai bahan evaluasi dikemudian hari terhadap program-program yang dijalankan oleh pemerintah Kota Bekasi khususnya dalam program pemberdayaan gelandangan dan pengemis sebagai salah satu strategi dalam menanggulangi kemiskinan di Kota Bekasi, selain itu juga diharapkan agar dapat memberikan manfaat bagi pengembangan keilmuan administrasi Negara.

1.5. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah melihat dan mengetahui pembahasan mengenai evaluasi program asistensi rehabilitasi sosial (ATENSI) dalam memberdayakan gelandangan dan pengemis secara keseluruhan, maka perlu menguraikan sistematika yang merupakan kerangka dan pedoman penulisan skripsi. Berikut adalah sistematika dalam penulisan skripsi yang memuat:

1. Bagian Awal Skripsi

Bagian awal berisi halaman sampul depan, halaman judul, halaman lembar persetujuan dosen pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan orisinalitas, halaman pernyataan persetujuan publikasi, halaman daftar riwayat hidup, halaman kata pengantar, halaman motto dan

persembahan, halaman abstrak, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran, arti lambang dan singkatan.

2. Bagian Inti Skripsi

Bagian inti terbagi atas bab dan sub bab yaitu sebagai berikut :

Bab I: Pendahuluan

Pada bab ini memuat beberapa sub bab yang menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian yang terdiri dari signifikansi akademik dan signifikansi praktis, dan sistematika penulisan.

Bab II : Kerangka Teori

Pada bab ini terdiri dari beberapa sub bab yang menguraikan tentang teori yang relevan dengan masalah yang diteliti yaitu evaluasi program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) dalam memberdayakan gelandangan dan pengemis yang diambil dari beberapa sumber seperti buku, jurnal, hasil penelitian berupa skripsi maupun tesis dan *website* serta produk hukum. Dalam bab ini peneliti juga menguraikan kerangka berfikir, dan asumsi penelitian.

Bab III: Metodologi Penelitian

Pada bab ini menguraikan tentang pembahasan paradigma penelitian, metode penelitian, desain penelitian, teknik perolehan data, teknis analisis data, *goodness and quality criteria* penelitian, tempat dan waktu penelitian, jadwal penelitian dan keterbatasan penelitian.

Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab hasil penelitian terdapat gambaran umum dari objek penelitian, memaparkan hasil penelitian dari rumusan masalah yang ingin diteliti dengan menyimpulkan dari hasil wawancara yang telah dilakukan, membedakan dan menyamakan hasil penelitian dengan peneliti terdahulu dan menjelaskan pentingnya penelitian yang telah diteliti.

Bab V: Penutup

Pada bab ini menguraikan tentang kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan menarik inti dari hasil penelitian tersebut. Kesimpulan dapat dikemukakan sebagai penyelesaian penelitian yang bersifat analisis obyektif yang merupakan masalah dalam penelitian. Dalam bab ini terdapat rekomendasi penelitian yang berisi saran ataupun rekomendasi dari peneliti untuk peneliti selanjutnya, dan saran dari peneliti untuk tempat dari objek penelitian tersebut.

3. Bagian Akhir Skripsi

Bagian akhir dari skripsi ini memuat tentang halaman daftar pustaka dan halaman daftar lampiran. Daftar pustaka memuat sumber seperti buku, jurnal, hasil penelitian berupa skripsi maupun tesis dan *website* serta produk hukum yang digunakan.